

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Asshiddiqie, Jimmly. Ilmu Hukum Tata Negara II Cetakan Pertama . Jakata: Konstitusi Press, 2006.
- Konstitusi dan Konstitusionalisme. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Perkembangan & Konsolidasi Penyelenggara pemilu Pasca Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Budhiati, Ida. Konstisionalitas Komisi Pemlihan Umum. Jakarta: Artikel Komisi Pemilihan Umum, 2012.
- Erfandi. Parliemetary Threshold dan HAM dalam Hukum Tata Negara Indonesia. Malang: Setara Press, 2014.
- Fahmi, Khairul. Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- H.A Prayitno dan Trubus, Kebangsaan. Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Universitas Trisakti, 2004.
- Hamdaris, Hamka. Tanggung Jawab Komisi Pemilihan Umum Terhadap Kelompok . Makasar: Universitas Hasanuddin, 2020.
- Ibrahim, Moh.Kusnardi dan Harmaili. Penghantar Hukum Tata Negara. Jakarta: Sinar Bakti, 1983.
- Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahsa Indonesia (KBBI) Edisi. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2012.
- Indrayana, Denny. Indonesia Constitution Law: Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta: Kencana, 2008.
- John Alder. General Principles of Constitutional and Administrative Law, (4th Edition). New York: Palgrave Macmillan, 2002.
- Martosoewignjo, Sri Soemantri. Demokrasi Pancasila dan Implementasinya Menurut/Dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bandung: Alumni, 1969.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2008.

Nahak, Uncianus Natalius Teti. Kedudukan dan Perlindungan Hukum Terhadap penyelenggara pemilu yang bersifat ad hoc. Surabaya: Universitas Airlangga, 2020.

Repository universitas airlangga. Universitas Airlangga. Agust 6, 2020. <https://repository.unair.ac.id/96698/> (accessed 6 4, 2025).

Nurlela. Analisis Kemandirian Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Dalam Sistem Konstitusi Indonesia. Riau: Universitas Islam Negeri SULTA Syarif Kasim, 2024.

Prihatmoko, Joko J. Pemilihan Kepala Daerah Langsung,. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Sanit, Arbi. Partai, pemilu dan demokrasi. Jakarta: Pustaka belajar, 1997.

Sodikin, Hukum Pemilu. Pemilu sebagai praktek ketatanegaraan. Bekasi: Gramata, 2014.

Jurnal

Ackerman, Bruce. "The New Separation of Powers." Harvard Law Review 113 (2000): 637-641.

Aditya, Dausat. Kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Dalam Sistem . jember: universitas jember, 2018.

Alamsyah, Hajir. "Tinjauan Yuridis Kududukan dan Kekuatan Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Unndagan." Universitas Sultan Agung, 2024: 71-74.

Basarah, Ahmad. "Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State`S Organ Dalam Struktur." Masalah-Masalah Hukum 43, no. 1 (2014): 2-3.

Uwita Rayahu Manurung, Irwansyah Irwansyah. "Kedudukan komisi pemilihan umum (KPU) Dan bawaslu sebagai state auxiliary agent dalam perspektif siyasah dusturiyah." Jurnal Educatio (Jurnal Pendidikan Indonesia) 9, no. 1 (2023): 510--511.

Kumolo, Tjahjo. Politik Hukum Pilkada Serentak. Jakarta: Expose, 2015.

Manurung, S. R. A. S., Sinaga, B. NPD., & Siburian, K,. "Analisis Yuridis Tentang Aspek Kelembagaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 2024: 112.

Marzuki, Suparman. "The Roles Of General Election Commission And General Election ." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 15, no. 3 (2008): 1-3.

- Merdekawaty, Lylych Indar. "An Analysis on the Position of General Election Commission (KPU) as an Independent in Indonesia State Governance System." University Sebelas Maret, 2009: 5-6.
- Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhdar, Muhdar. "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Penegakan dan Kepastian Hukum di Indonesia." Jurnal Ilmu Hukum dan Politik 1, no. 4 (2023): 151-153.
- Pal, Michael. "Electoral Management Bodies as a Fourth Branch of Government." University of Ottawa, 2016: 2-5.
- Raden, Sahran. "Kompleksitas Pemilu 2024 dan Kedudukan Hukum (Rechtspositie) Komisi Pemilihan Umum dalam Menetapkan Jadwal Pemilu 2024." Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Datokarama, 2024: 2-4.
- Ramadani, R. "Lembaga negara independen di Indonesia dalam perspektif konsep Independent Regulatory Agencies." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 27, no. 1 (2020): 169–192.
- Rayhan, Ahmad. "Hierarki Lembaga Negara Di Indonesia." Sultan Jurisprudence Jurnal Riset 1, no. 1 (2021): 72-75.
- Ridho, Ahmad Zaini & Moh. Zainor. "The Auxiliary State Organ Authorities in Indonesia: The Constitutional Implications of Law No. 19 of 2019 Concerning KPK." Potret Pemikiran 27, no. 2 (2023): 186–187.
- Rifandanu, F. "Urgensi Penaan Kembali Lembaga-Penyelenggara pemilu Independen Dalam Mewujudkan Sistem Pemerintahan yang Demokratis dan Konstitusional." DATIN LAW JURNAL 5, no. 1 (2024): 10-27.
- Rohmatul Jannah, Et.al. "Analisis Hukum Kedudukan Lembaga Negara Berdasarkan UUD 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora 3, no. 3 (2024): 75-76.
- S, Laurensius Arliman. "Teori Organ Negara Sebagai Dasar Pembentukan Dan Penguatan Lembaga Negara Di Indonesia." Ensiklopedia Of Journal 3 (2024): 313.
- Susanto, Sri Nur Hari. "Pergeseran Kekuasaan Lembaga Negara Pasca Amandemen Uud 1945." Masalah-Masalah Hukum 43, no. 2 (2014): 279-280.

Syailendra Anantya Prawira, Amalia Diamantina. "Election violation and election law enforcement in general election in Indonesia." *Jurnal Hukum Volkgeist* 4, no. 1 (2019): 28.

Winardi. "Menyoal Independensi dan Profesionalitas Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah." *Jurnal Konstitusi* III, no. 2 (2010): 60.

Wulandari, J. D., Prastiwi, D. E., Suandari, M., & Aldriani, S. "Pengaruh Hubungan Antar Penyelenggara pemilu terhadap Pengambilan Keputusan dalam Sistem Pemerintahan Presidensial." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 11 (2024): 863-868.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum;

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;

Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.